

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi sasaran suatu riset. Penelitian ini memiliki objek laporan keuangan tahun 2013 – 2018 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari perusahaan sektor finansial. Sektor keuangan merupakan sektor yang sangat sering berkaitan dengan korupsi. Survei oleh ACFE 2016 menunjukkan bahwa industri kedua dari sepuluh industri yang diteliti dan yang paling banyak dirugikan oleh adanya *fraud* berupa korupsi adalah industri keuangan dan perbankan yang memiliki persentase kerugian sebesar 15,9% (ACFE, 2017). Didukung oleh data dari website (Beritagar.id, 2017) menunjukkan bahwa nilai kerugian negara paling besar yang diakibatkan oleh sektor keuangan mencapai Rp 34.905.750.000.000 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lain. Kerugian yang cukup besar yang dialami ini diakibatkan oleh kurangnya tata kelola perusahaan yang baik dan mudahnya seseorang untuk melakukan *fraud* di sektor ini sehingga diperlukan adanya sebuah peraturan terkait kebijakan anti korupsi yang dapat mengatur dan mengikat komitmen setiap organ – organ perusahaan agar tidak turut melakukan tindak korupsi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan yang didapatkan dari *website* Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun dari *website* perusahaan yang bersangkutan.

3.2 Populasi dan Sampel

Semua objek penelitian yang memiliki kesamaan karakteristik disebut populasi. Dalam riset ini, populasinya adalah perusahaan yang bergerak di sektor finansial dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013 hingga tahun 2018. Sampel merupakan bagian dari populasi. Proses pengambilan sampel dalam penelitian kali ini menggunakan metode *purposive sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria sampel yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan sektor finansial yang terdaftar di BEI selama periode 2013 - 2018.
2. Laporan tahunan perusahaan yang terpublikasi.
3. Laporan tahunan perusahaan yang memiliki data lengkap / data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Cara pemilihan sampel dapat dilihat pada tabel di bawah ini . Jumlah sampel perusahaan yang tersedia untuk observasi guna untuk menguji hipotesis adalah 456 observasi.

Table 1. Kriteria Pemilihan Sample

No.	Kriteria	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Σ
1.	Perusahaan sektor finansial yang terdaftar di BEI selama periode 2013 hingga 2018.	89	89	89	89	89	89	534
2.	Laporan tahunan perusahaan yang tidak terpublikasi.	(29)	(22)	(13)	(13)	(1)	(0)	78
Total Sampel		60	67	76	76	88	89	456

Sumber : Lampiran 2 – Kriteria Pemilihan Sample.

3.3 Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada riset ini yakni data sekunder yang berupa laporan tahunan perusahaan sektor finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 hingga 2018. Dan data dapat diperoleh dari *website* Bursa Efek Indonesia (BEI) yakni www.idx.co.id dan *website* perusahaan – perusahaan terkait yang diperlukan.

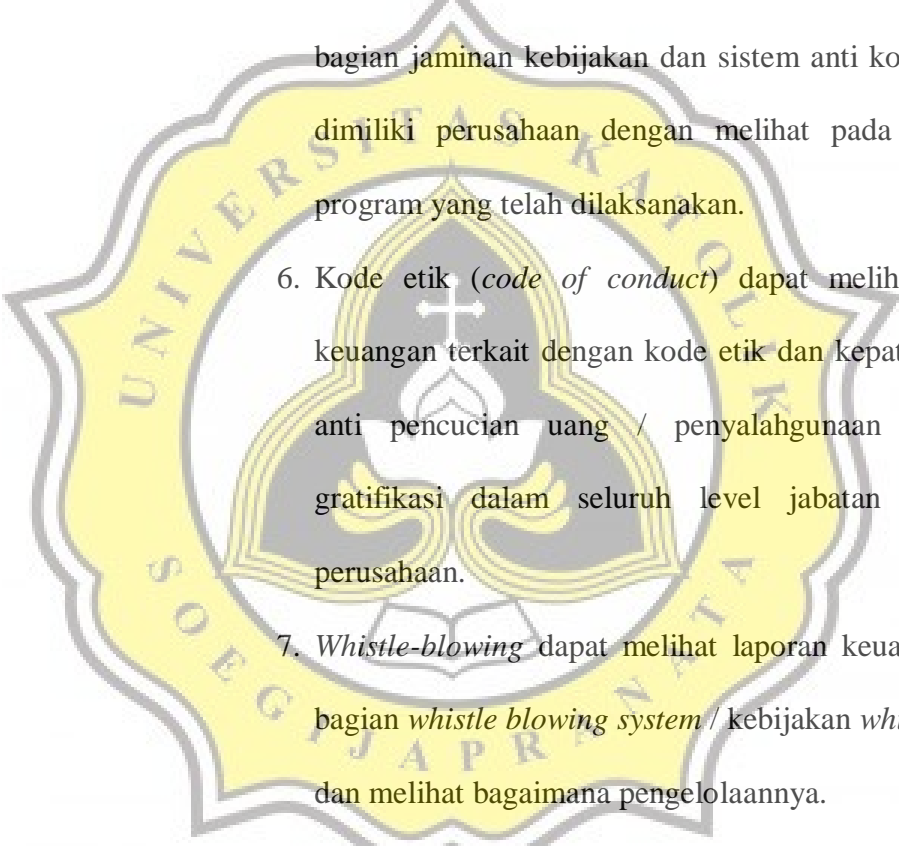
Dalam laporan tahunan, berikut rincian sumber datanya :

1. Variabel Dependen

Kebijakan Anti Korupsi (KAK)

Berdasarkan jurnal (Hermanto & Hartomo, 2019) mendapatkan data variabel kebijakan anti korupsi dapat dilakukan dengan menelaah 7 tema sebagai berikut :

1. Akuntansi untuk memerangi suap (*accounting for combating bribery*) dapat melihat laporan keuangan yang memiliki kata kunci seperti : penyuapan, gratifikasi, pencucian uang, penyalahgunaan jabatan, pengelolaan dana, pengelolaan program kerja, pelanggaran kode etik.
2. Tanggung jawab dewan dan manajer senior (*board & senior management responsibilities*) dapat melihat laporan keuangan pada bagian *board of director* terkait dengan pernyataan dan komitmen dalam menjalani kode etik oleh dewan komisaris serta direksi untuk memberantas korupsi.
3. Membangun sumber daya manusia untuk memerangi penyuapan (*building human resources to combat bribery*) dapat melihat laporan keuangan mengenai bagaimana perusahaan melakukan komunikasi, melakukan *training* karyawan dalam mematuhi kebijakan dan prosedur anti korupsi perusahaan.

- 
4. Hubungan bisnis yang bertanggung jawab (*responsible business relation*) dapat melihat laporan keuangan pada bagian hubungan dengan pihak ketiga.
 5. Verifikasi dan jaminan eksternal (*external verification and assurance*) dapat melihat laporan keuangan pada bagian jaminan kebijakan dan sistem anti korupsi yang dimiliki perusahaan dengan melihat pada pelaporan program yang telah dilaksanakan.
 6. Kode etik (*code of conduct*) dapat melihat laporan keuangan terkait dengan kode etik dan kepatuhan pada anti pencucian uang / penyalahgunaan jabatan / gratifikasi dalam seluruh level jabatan organisasi perusahaan.
 7. *Whistle-blowing* dapat melihat laporan keuangan pada bagian *whistle blowing system* / kebijakan *whistleblower* dan melihat bagaimana pengelolaannya.

2. Variabel Independen

1. Independensi Dewan Komisaris (IDKS)

Berdasarkan jurnal milik (Tirtasari & Hartomo, 2019) sumber data untuk mendapatkan data variabel independensi dewan komisaris adalah dengan melihat

jumlah dewan komisaris yang independen pada bagian daftar komisaris perusahaan.

2. Kompetensi Komite Audit (KIKa)

Berdasarkan jurnal milik (Tirtasari & Hartomo, 2019) mendapatkan data variabel kompetensi komite audit dapat melihat pada bagian profil komite audit dan menelusuri apakah di dalam CV komite audit tersebut memiliki pendidikan / pengalaman dalam bidang akuntansi / keuangan, dengan begitu kita dapat mengetahui berapa jumlah komite audit yang berkompeten.

3. Kepemilikan Institusional (SKI)

Berdasarkan jurnal milik (Tirtasari & Hartomo, 2019) untuk mendapatkan data variabel kepemilikan institusional maka dapat melihat persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi atau lembaga pada catatan atas laporan keuangan.

4. Kepemilikan Manajerial (SKM)

Berdasarkan jurnal milik (Hermanto & Hartomo, 2019) cara mendapatkan data variabel kepemilikan manajerial dengan melihat nama – nama komisaris dan direksi

apakah terdapat di dalam daftar kepemilikan saham perusahaan. Atau bisa dikatakan sumber data bisa didapatkan dengan mencocokkan nama orang – orang yang memiliki posisi / jabatan manajerial dalam perusahaan yang turut serta memiliki saham perusahaan tersebut.

5. Kepemilikan *Blockholder* (SKB)

Mendapatkan data variabel kepemilikan *blockholder* dengan melihat pemegang saham substansial yang dimiliki oleh pihak internal perusahaan seperti direksi / anggota keluarga / karyawan dalam perusahaan tersebut maupun pihak ketiga yang mempunyai pengaruh dalam perusahaan tersebut baik kreditur maupun debitur seperti bank / pegadaian / perusahaan lain yang memiliki jumlah saham 5% atau lebih dari keseluruhan jumlah saham yang beredar. Berdasarkan jurnal milik (Hermanto & Hartomo, 2019) sumber data bisa didapatkan dari laporan keuangan bagian pihak – pihak yang berelasi.

6. Kepemilikan Pemerintah (SKP)

Berdasarkan jurnal milik (Hermanto & Hartomo, 2019) sumber data untuk mendapatkan data variabel kepemilikan pemerintah dapat melihat saham yang

dimiliki pemerintah dalam total keseluruhan kepemilikan saham perusahaan.

7. Tata Kelola Perusahaan (TKP)

Sumber data tata kelola perusahaan diambil langsung dari Bloomberg dilihat dari manajemen, *shareholder*, dan *csr strategy*.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan observasi pada objek penelitian guna memperoleh data sekunder, yaitu dengan mengakses situs resmi dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yakni www.idx.co.id.

3.3.3 Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data sekunder yang tidak didapat langsung dari objek penelitian. Peneliti juga melakukan observasi pada objek penelitian.

3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yakni variabel independen atau biasa disebut dengan variabel bebas dan variabel dependen atau biasa disebut dengan variabel terikat.

3.4.1 Variabel Dependen

1. Kebijakan Anti Korupsi (KAK)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Kebijakan anti korupsi merupakan variabel dependen dalam penelitian. Perusahaan berusaha untuk memiliki kebijakan anti korupsi yang merupakan suatu alat atau perangkat yang dimiliki perusahaan sebagai cara untuk mengurangi adanya tindak korupsi di perusahaan dan untuk bertanggung jawab atas kinerja perusahaan dan perilaku setiap karyawannya. Kebijakan anti korupsi dalam penelitian ini dilihat dari semakin banyak atau lengkapnya kebijakan anti korupsi dalam perusahaan, sehingga apabila kebijakan anti korupsi suatu perusahaan semakin lengkap maka akan semakin baik. Kebijakan anti korupsi diukur berdasarkan indeks acuan dari (Dissanayake et al., 2010) yang terdiri dari 7 tema yaitu : akuntansi untuk memerangi suap (*accounting for combating bribery*), tanggung jawab dewan dan manajer senior (*board & senior management responsibilities*), membangun sumber daya manusia untuk memerangi penyuapan (*building human resources to combat bribery*), hubungan bisnis yang bertanggung jawab (*responsible business relation*), verifikasi dan jaminan eksternal (*external verification and assurance*), kode etik (*code of conduct*), dan *whistle-blowing*. Skoring dalam penelitian ini memiliki rentang 1 -7. Kebijakan anti korupsi perusahaan dikatakan baik apabila lengkap. Berdasarkan jurnal milik (Hermanto & Hartomo, 2019) perhitungan variabel ini yakni apabila perusahaan memiliki kebijakan anti korupsi 1 maka perusahaan memiliki kebijakan anti korupsi yang tidak baik karena tidak lengkap, sedangkan apabila memiliki skoring 7 maka kebijakan

anti korupsi perusahaan tersebut baik karena sangat lengkap, sehingga semakin banyak perusahaan berhasil memenuhi pernyataan yang ada, maka kebijakan anti korupsi perusahaan akan semakin lengkap.

3.4.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Terdapat 7 variabel independen dalam penelitian berikut ini, yaitu :

1. Independensi Dewan Komisaris (IDKS)

Independensi dewan komisaris merupakan rasio dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan dibanding dewan komisaris dari dalam perusahaan. Variabel independensi dewan komisaris ini diukur dengan membandingkan jumlah dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dengan total keseluruhan dewan komisaris yang ada dalam perusahaan. Variabel ini menggunakan skala rasio dengan skoring yang memiliki rentang 0 - 100% dimana semakin tinggi skor IDKS maka dewan komisaris semakin independen. Berdasarkan jurnal milik (Tirtasari & Hartomo, 2019) variabel ini dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$IDKS = \frac{\text{Jumlah dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan}}{\text{Total keseluruhan dewan komisaris}} \times 100\%$$

2. Kompetensi Komite Audit (KKA)

Komite audit merupakan orang yang diambil dari anggota dewan komisaris namun tidak menjalankan kegiatan operasi perusahaan atau tidak termasuk dalam manajemen perusahaan. Kompetensi komite audit diukur dengan membagi jumlah komite audit yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan dengan jumlah keseluruhan komite audit di perusahaan yang bersangkutan. Variabel kompetensi komite audit ini menggunakan skala rasio dengan skoring yang memiliki rentang 0 - 100% dimana semakin tinggi skor KKA maka komite audit semakin kompeten. Berdasarkan jurnal (Tirtasari & Hartomo, 2019) variabel ini dihitung dengan cara berikut :

$$KKA = \frac{\text{Jumlah komite audit yang berkompeten}}{\text{Jumlah seluruh komite audit}} \times 100\%$$

3. Kepemilikan Institusional (SKI)

Kepemilikan manajerial merupakan keadaan dimana suatu lembaga (perusahaan asuransi, investasi, bank, dan lainnya) turut memegang saham di suatu perusahaan. Data variabel kepemilikan institusional didapatkan dari Bloomberg Data Based atau diukur dengan membandingkan saham yang dimiliki oleh suatu institusi dengan jumlah saham yang beredar. Variabel ini menggunakan skala rasio dengan skoring yang memiliki rentang 0 - 100% dimana semakin tinggi skor SKI maka semakin besar kepemilikan institusional. Berdasarkan jurnal milik (Tirtasari & Hartomo, 2019) variabel ini diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$SKI = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

4. Kepemilikan Manajerial (SKM)

Kepemilikan manajerial menggambarkan jumlah persentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan. Variabel ini diukur dengan melihat jumlah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen seperti dewan direksi dan dewan komisaris perusahaan tersebut dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar (Murwaningsari et al., 2006). Struktur kepemilikan manajerial ini menggunakan skala rasio dengan skoring yang memiliki rentang 0 - 100% dimana semakin tinggi skor SKM maka semakin besar kepemilikan manajerial.. Berdasarkan jurnal milik (Hermanto & Hartomo, 2019) variabel ini diukur dengan rumus berikut ini :

$$SKM = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

5. Kepemilikan *Blockholder* (SKB)

Kepemilikan *blockholder* merupakan pemegang saham substansial yang dimiliki oleh pihak internal perusahaan seperti direksi / anggota keluarga / karyawan dalam perusahaan tersebut maupun pihak ketiga yang mempunyai pengaruh dalam perusahaan tersebut baik kreditur maupun debitur seperti bank / pegadaian / perusahaan lain yang memiliki jumlah saham 5% atau lebih dari keseluruhan jumlah saham yang beredar. Variabel

ini menggunakan skala rasio dengan skoring yang memiliki rentang 0 - 100% dimana semakin semakin tinggi skor SKB maka semakin besar kepemilikan *blockholder*. Berdasarkan jurnal milik (Hermanto & Hartomo, 2019) variabel ini diukur dengan rumus berikut ini :

$$SKB = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki blockholder}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

6. Kepemilikan Pemerintah (SKP)

Kepemilikan pemerintah menggambarkan jumlah atau proporsi saham yang dimiliki oleh pemerintah di dalam suatu perusahaan. Kepemilikan pemerintah ini menggunakan skala rasio dengan skoring yang memiliki rentang 0 - 100% dimana semakin tinggi skor SKP maka semakin besar kepemilikan pemerintah. Menurut jurnal milik (Hermanto & Hartomo, 2019) variabel ini diukur dengan rumus berikut ini :

$$SKP = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki pemerintah}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

7. Tata Kelola Perusahaan (TKP)

Tata kelola perusahaan merupakan sebuah peraturan yang mengatur hubungan antara pengelola perusahaan, pemegang saham, karyawan, kreditur, pemerintah, dan seluruh pemegang kepentingan eksternal dan internal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka. Tata kelola perusahaan diukur menggunakan kriteria skoring ESG dengan mengambil informasi mengenai *Governance* yang memiliki kategori seperti :

management, shareholder, dan CSR strategy. Data score ESG didapatkan langsung melalui *Bloomberg data based*. Tata kelola perusahaan ini menggunakan skala rasio dengan skoring yang memiliki rentang 0 - 100% dimana semakin tinggi skor TKP maka semakin baik tata kelola perusahaan.

3.5 Desain Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Menguji hipotesis memerlukan beberapa langkah / prosedur yaitu : menyatakan hipotesisnya, memilih pengujian statistiknya, menentukan tingkat keyakinan yang diinginkan dalam penelitian, menghitung nilai statistik, mendapatkan nilai uji kritis, dan yang terakhir adalah menginterpretasikan hasil penelitian. Pada penelitian ini pengujian yang digunakan antara lain : uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi), analisis regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis. Pengujian dilakukan dengan menggunakan software Eviews.

3.5.1 Menyatakan Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian bisa dinyatakan dalam bentuk nol atau dalam bentuk alternative. Hipotesis nol berarti menyatakan tidak berbeda, sedangkan hipotesis alternatif berarti menyatakan berbeda.

Hipotesis 1

- a. $H_0 : \beta_1 \leq 0$, berarti independensi dewan komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap kelengkapan kebijakan anti korupsi.
- b. $H_a : \beta_1 > 0$, berarti independensi dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap kelengkapan kebijakan anti korupsi.

Hipotesis 2

- a. $H_0 : \beta_2 \leq 0$, berarti kompetensi komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap kelengkapan kebijakan anti korupsi.
- b. $H_a : \beta_2 > 0$, berarti kompetensi komite audit memiliki pengaruh positif terhadap kelengkapan kebijakan anti korupsi.

Hipotesis 3

- a. $H_0 : \beta_3 \leq 0$, berarti kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap kelengkapan kebijakan anti korupsi.
- b. $H_a : \beta_3 > 0$, berarti kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap kelengkapan kebijakan anti korupsi.

Hipotesis 4

- a. $H_0 : \beta_4 \leq 0$, berarti kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap kelengkapan kebijakan anti korupsi.
- b. $H_a : \beta_4 > 0$, berarti kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap kelengkapan kebijakan anti korupsi.

Hipotesis 5

- a. $H_0 : \beta_5 \leq 0$, berarti kepemilikan *blockholder* memiliki pengaruh negatif terhadap kelengkapan kebijakan anti korupsi.
- b. $H_a : \beta_5 > 0$, berarti kepemilikan *blockholder* memiliki pengaruh positif terhadap kelengkapan kebijakan anti korupsi.

Hipotesis 6

- a. $H_0 : \beta_6 \leq 0$, berarti kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh negatif terhadap kelengkapan kebijakan anti korupsi.
- b. $H_a : \beta_6 > 0$, berarti kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap kelengkapan kebijakan anti korupsi.

Hipotesis 7

- a. $H_0 : \beta_7 \leq 0$, berarti tata kelola perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap kelengkapan kebijakan anti korupsi.
- b. $H_a : \beta_7 > 0$, berarti tata kelola perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap kelengkapan kebijakan anti korupsi.

Persamaan Regresi :

$$\begin{aligned} KAK = & \beta_0 + \beta_1.IDKS + \beta_2.KIKA + \beta_3.SKI + \beta_4.SKM + \beta_5.SKB + \\ & \beta_6.SKP + \beta_7.TKP + e \end{aligned}$$

3.5.2 Memilih Pengujian Statistik

Setelah mengetahui hipotesis penelitian dan merumuskannya, maka kita dapat mengetahui metode apa yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Menurut (Monika Palupi Murniati et al., 2013) apabila variabel independen serta variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan skala rasio, maka dalam penelitian ini pengujian datanya akan dilakukan dengan menggunakan regresi. Regresi berganda digunakan karena dalam penelitian ini terdapat lebih dari satu variabel independen. Apabila melihat dari bentuk hubungannya maka penelitian ini menggunakan regresi linier di mana variabel independen maupun variabel dependen sebagai faktor yang berpangkat satu. Dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda untuk pengujian. Berikut merupakan uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini :

3.5.2.1 Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik ini untuk menguji apakah model regresi yang digunakan pada penelitian ini sudah layak diuji atau tidak layak diuji. Uji asumsi klasik berguna untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau tidak, apakah terdapat masalah multikolinearitas / heteroskedastisitas/ masalah autokorelasi atau tidak. Apabila syarat – syarat tersebut terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa model analisis telah layak digunakan. Pengujian asumsi klasik terdiri dari :

a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui data yang sedang digunakan apakah telah berdistribusi normal atau tidak. Kurva normal yang berbentuk simetris adalah gambaran dari kurva yang berdistribusi normal (Monika Palupi Murniati et al., 2013). Apabila data yang diteliti telah normal, maka model regresi penelitian ini adalah baik. Uji normalitas melalui Eviews menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov Test*. Apabila nilai probabilitasnya $\text{sig} > 0,05$ dengan $\alpha = 5\%$ maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

b) Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Monika Palupi Murniati et al., 2013) uji ini dilakukan untuk mendapatkan situasi heteroskedastisitas (tidak homogenitas) dimana keragaman variabel independennya bervariasi dan tidak ada kesamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila varian dari residual atau *error* satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap atau bersifat konstan, maka disebut homoskedastisitas dan apabila berbeda atau tidak bersifat konstan maka disebut heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas ini menggunakan uji Glejser. Model regresi dapat dikatakan bebas dari heteroskedastisitas apabila nilai signifikansinya $> 0,05$.

c) Uji Autokorelasi

Kasus mengenai autokorelasi biasanya terjadi dengan data *time series* yang memiliki arti bahwa kondisi yang sekarang dipengaruhi oleh waktu yang lalu (Monika Palupi Murniati et al., 2013). Sehingga, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Bila terjadi korelasi maka disimpulkan bahwa terjadi masalah autokorelasi. Data yang terbebas dari masalah autokorelasi berarti model regresinya baik. Pengujian autokorelasi menggunakan uji *Durbin-Watson*.

d) Uji Multikolinearitas

Regresi tidak akan menjadi efisien atau akan terdapat penyimpangan yang besar apabila terdapat multikolinieritas (Gujarati, 2012) dalam (Monika Palupi Murniati et al., 2013). Pengujian multikolinearitas ini digunakan untuk menguji model regresi yang digunakan. Uji ini melihat apakah terdapat korelasi antara variabel bebas atau tidak. Uji multikolinearitas diuji dengan melihat *Variance Inflation Factor* (VIF). Bila nilai $VIF < 10$ maka tidak terdapat masalah multikolinearitas.

3.5.2.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis linier berganda digunakan untuk melihat hubungan fungsional variabel dependen (variabel KAK) dengan variabel independen

(variable IDK, KKA, SKI, SKM, SKB, SKP, TKP) dan bisa dinyatakan dengan persamaan :

$$KAK = \beta_0 + \beta_1.IDKS + \beta_2.KIKA + \beta_3.SKI + \beta_4.SKM + \beta_5.SKB + \beta_6.SKP + \beta_7.TKP + e$$

Dimana :

KAK = Kebijakan Anti Korupsi

β_0 = Konstanta

$\beta_1 - \beta_7$ = Koefisien Regresi

IDKS = Independensi Dewan Komisaris

KIKA = Kompetensi Komite Audit

SKI = Kepemilikan Institusional

SKM = Kepemilikan Manajerial

SKB = Kepemilikan Blockholder

SKP = Kepemilikan Pemerintah

TKP = Tata Kelola Perusahaan

e = *Error*



3.5.3 Menentukan Tingkat Keyakinan

Penelitian ini menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95%. Hal ini berarti bahwa dalam penelitian ini tingkat toleransi kesalahannya adalah 5% atau sebesar 0,05.

3.5.4 Menentukan Nilai Statistik

Setelah mengetahui pengujian dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah menentukan nilai statistik. Untuk menghitung nilai statistik maka dapat dilakukan dengan menggunakan E-views.

3.5.5 Mendapatkan Nilai Uji Kritis

Nilai uji kritis bergantung pada besarnya *confidence coefficient* serta arah hipotesis penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini berarah, maka akan menggunakan pengujian satu arah (*one-tailed*). Maka, dengan nilai α sebesar 0,05 atau 5% maka $Z_{\alpha} = 1,65$.

3.5.5.1 Uji F Regresi atau Uji Ragam Regresi

Uji F atau uji ragam regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini. Jika nilai F signifikan maka artinya minimal salah satu variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.5.2 Uji-t atau Uji Koefisien Regresi

Uji-t yang merupakan pengujian yang digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian. Uji-t ini dilakukan dengan cara membandingkan t hitung dengan t tabel (1,645). T hitung harus lebih besar dari t tabel, sehingga apabila $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_a diterima.

3.5.5.3 Koefisien Determinasi (R^2) atau Uji R Garis Regresi

Koefisien determinasi (R^2) biasanya digunakan untuk mengevaluasi model fit. R^2 juga digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel bebas untuk menjelaskan variasi dengan variabel terikat. Apabila nilai koefisien determinasi (R^2) kecil maka kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangatlah terbatas, sedangkan apabila nilai koefisien determinasi (R^2) besar atau hampir mendekati 1 maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas bisa menjelaskan seluruh informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel terikatnya, atau bisa dibilang bahwa persamaan regresinya baik. Koefisien determinasi (R^2) diuji dengan melihat *Adjusted R-squared* .

3.5.6 Menginterpretasikan Hasil Penelitian

Setelah melakukan pengujian maka kita dapat menarik kesimpulan dan menginterpretasikan penerimaan atau penolakan dari hipotesis dalam penelitian. Berikut merupakan cara pengujian hipotesis. Uji hipotesis ini dilakukan untuk menguji pengaruh dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis dalam penelitian ini adalah hipotesis berarah, sehingga bila nilai *error* 5%, $\beta > 0$ dan nilai *t* tabel = 1,645 maka hipotesis akan diterima jika :

H1 : nilai *t* hitung > *t* tabel, dan β_1 positif. Maka H1 diterima.

H2 : nilai *t* hitung > *t* tabel, dan β_2 positif. Maka H2 diterima.

H3 : nilai *t* hitung > *t* tabel, dan β_3 positif. Maka H3 diterima.

H4 : nilai *t* hitung > *t* tabel, dan β_4 positif. Maka H4 diterima.

H5 : nilai *t* hitung > *t* tabel, dan β_5 positif. Maka H5 diterima.

H6 : nilai *t* hitung > *t* tabel, dan β_6 positif. Maka H6 diterima.

H7 : nilai *t* hitung > *t* tabel, dan β_7 positif. Maka H7 diterima.